



# Pelimpahan Pasar Sangsit 'Nyantol'

SINGARAJA, NusaBali

Keputusan pelimpahan pengelolaan pasar tradisional di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan kepada pihak adat Sangsit Dauh Yeh, ternyata belum juga terealisasi. Warga pun mempertanyakan hal itu, karena semua proses telah disepakati.

Belum, kami juga menunggu, tapi ini kan sudah sangat lama prosesnya," keluh seorang tokoh Desa Sangsit, Selasa (23/6). Ia pun berharap proses itu bisa segera terrealisasi karena pihaknya sudah mengikuti proses sesuai keinginan dari Pemkab.

Pelimpahan pengelolaan Pasar Sangsit sendiri kala itu tinggal menunggu dasar hukum. Sementara dalam dasar hukum itu sudah digodok oleh Bagian Hukum Setkab

Buleleng, sehingga diketahui pelimpahan itu cukup dengan surat keputusan (SK) atau peraturan bupati (Perbup). Namun, hal itu belum juga tuntas hingga pertengahan bulan Juni ini.

Di tempat terpisah Koordinator tim pelimpahan pasar Setkab Buleleng, Ketut Suparto yang dikonfirmasi mengakui pelimpahan itu belum terealisasi. Menurut Suparto, kondisi itu akibat kesalahan teknis, dimana pelimpahan itu dianggap pelimpahan aset. Sehingga surat kajian itu justru masuk ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). "Kemarin sempat terjadi kesalahan teknis, semestinya itu cukup pelimpahan pengelolaan, bukan pelimpahan asset, sekarang suratnya itu sudah diambil dari BPKAD," terangnya.

Suparto yang juga Kabag Ekonomi

dan Pembangunan (Ekbang) Setkab Buleleng menegaskan, pelimpahan itu akan segera terlaksana paling lambat awal bulan Juli nanti. Karena suratnya itu sudah kembali disampaikan ke Bagian Hukum. "Kami berharap sabar dulu, tapi sekarang sudah diproses kembali. Kita akan segerakan ini," imbuh Suparto.

Dalam pelimpahan pengelolaan pasar Sangsit itu telah disepakai sharing bagi hasil itu 30 persen ke Pemkab berbanding 70 persen untuk adat. Sharing sebesar 30 persen itu diambilkan dari total penghitungan pendapatan pasar yang terdiri dari cukai harian, sewa tanah, dan pendapatan lain-lain yang sah dan telah dipotong biaya-biaya.

"Ini sudah kita sepakati pembagiannya 70 berbanding 30 persen. Sharing ini merupakan sisa hasil usaha (SHU) dari ketiga

sumber itu dan telah diptong biaya-biaya," tegasnya.

Di sisi lain, dia mengatakan, setelah Pasar Sangsit diserahkan pengelolaannya paling lambat bulan ini, pemerintah daerah meminta agar karyawan yang sebelumnya dipekerjakan oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Buleleng agar tetap dipekerjakan.

Hal ini karena ada dua orang karyawan di pasar setempat berstatus sebagai karyawan PD Pasar dan keduanya merupakan warga lokal. Permintaan ini pun sudah disepakati, sehingga tinggal mempertegas kembali di dalam draf dasar hukum yang tengah dibahas. "Mereka itu juga warga di sana dan statusnya karyawan PD Pasar Buleleng, sehingga kita minta tetap dipekerjakan," tegasnya. **k19**

Edisi : Rabu, 24 Juni 2015

Hal : 4



# Pemprov Bali Tunggu Usulan Pemberhentian Bupati Bangli

DENPASAR, NusaBali

Pemerintah Provinsi Bali hingga saat ini masih menunggu usulan pemberhentian bupati dari Pemerintah Kabupaten Bangli terkait penyampaian nama-nama pejabat pemprov yang akan menjadi penjabat bupati di lima kabupaten/kota. "Bangli kami masih menunggu usul pemberhentiannya. Katanya, menurut informasi yang saya dapatkan tanggal 18 kemarin diparipurnakan, tetapi resmi usulan ke provinsi belum kami terima," kata Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pelayun, di Denpasar, Selasa (23/6).

Pria yang juga Sekda Bali itu menambahkan, kalau usulan pemberhentian bupati/wali kota dari lima kabupaten/kota (Denpasar, Badung, Tabanan, Bangli dan Karangasem) sudah lengkap semuanya, baru disampaikan calon penjabat bupatinya ke Kementerian Dalam Negeri. Hingga saat ini baru empat kabupaten/kota yang sudah menyerahkan usulan pemberhentian bupati dan wali kotanya.

Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 akan dilaksanakan pada enam kabupaten/kota di Bali, tetapi Pemprov Bali hanya menyiapkan lima penjabat bupati karena untuk di Kabupaten Jembrana, masa jabatan bupati berakhir 16 Februari 2016. Cok Pelayun menambahkan, dari 42 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Bali yang namanya digodok untuk calon penjabat bupati, berdasarkan hasil evaluasi saat ini sudah disaring menjadi tinggal 17 nama.

Sedangkan untuk menentukan menjadi lima nama, lanjut dia, itu menjadi kewenangan

## KEPALA DAERAH YANG HARUS DIGANTIKAN 'PENJABAT' BUPATI

NO	NAMA	JABATAN	MASA TUGAS
1	I Wayan Geredeg	Bupati Karangasem *)	Hingga 21 Juli 2015
2	AA Gde Agung	Bupati Badung **)	Hingga 5 Agustus 2015
3	I Made Gianyar	Bupati Bangli ***)	Hingga 5 Agustus 2015
4	Ni Putu Eka Wiryastuti	Bupati Tabanan ****)	Hingga 9 Agustus 2015
5	Ida Bagus Rai D Mantra	Walikota Dps *****)	Hingga 11 Agustus 2015

### KETERANGAN

- \*) Diusung Golkar, duet dengan Made Sukerana di posisi Wakil Bupati
- \*\*\*) Diusung Demokrat-Golkar dan parpol koalisi, awalnya duet dengan Ketut Sudikerta di Wakil Bupati, kemudian di-PAW Made Sudiana
- \*\*\*\*) Diusung PDIP, duet dengan SN Sedana Arta di posisi Wakil Bupati
- \*\*\*\*\*) Diusung PDIP, duet dengan IKG Sanjaya di posisi Wakil Bupati
- \*\*\*\*\*) Diusung PDIP, duet dengan IGN Jaya Negara di posisi Wk Walikota

Gubernur Bali Made Mangku Pastika. "Sabar dulu (nama-namanya itu-red), kami tidak mau mendahului pak gubernur," ujarnya.

Terkait dengan proses evaluasi, pihaknya lebih kepada aspek persyaratan yang harus dipenuhi penjabat bupati disesuaikan dengan undang-undang. Dia tidak memungkiri, untuk pejabat Pemprov Bali yang akan menjadi penjabat bupati, tidak harus berasal dari kabupaten dan kota bersangkutan.

Menurut Cok Pelayun, kalau usulan pemberhentian bupati dari Pemkab Bangli segera dapat diterima, maka pihaknya juga segera dapat memproses nama penjabat bupati untuk dikirimkan ke Kemendagri. "Hari ini maunya kami bahas untuk yang terakhir," ucapnya.

Sebelumnya berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, pada enam kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pilkada serentak 9 Desember mendatang, masa jabatan kepala daerahnya berakhir sebagai berikut, yakni Karangasem berakhir 21 Juli 2015, Bangli (5 Agustus 2015), Denpasar (11 Agustus 2015), Badung (5 Agustus 2015), Tabanan (9 Agustus 2015) dan Jembrana (berakhir 16 Februari 2016). **ant, isu**

Edisi : Rabu, 24 Juni 2015

Hal : 16



## Relokasi Kantor Desa Pacung Memanas, Salah Satu Pakraman Menolak

SINGARAJA, NusaBali

Situasi di Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, kini sedikit memanas. Masalahnya rencana merelokasi kantor desa ke tempat lain justru ditentang oleh pihak adat. Mediasi pun dilakukan hingga akhirnya keputusan relokasi itu diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.

Informasi yang dihimpun, kantor desa yang berlokasi di Banjar Dinas Alap Sari, rencananya dipindah ke Banjar Dinas Alas Sari. Rencananya pembangunan kantor desa itu memanfaatkan lahan hampir satu hektare dengan nilai bangunan mencapai Rp 1 miliar secara bertahap.

Namun rencana itu ditentang oleh pihak Pakraman Pacung, Konon, Pakraman Pacung tidak terima kantor desa dipindah ke Alas Sari karena wilayah Alas Sari masuk wewidangan Pakraman Bakah. Di Desa Pacung sendiri terdapat dua Desa Pakraman yakni Pakraman Pacung dan Pakraman Bakah.

Penolakan Pakraman Pacung itu disampaikan melalui surat resmi dengan alasan diantaranya menyangkut historis dari kantor desa, kemudian lokasi kantor desa itu menjadi Ulu Desa, sekaligus pusat pemerintahan dan ekonomi.

Akibat surat penolakan itu, Selasa (23/6) pagi dilakukan mediasi di kantor desa. Upaya mediasi itu pun dijaga ketat aparat Polsek Tejakula. Dalam

mediasi itu disepakati bahwa, keputusan relokasi itu diserahkan kepada BPD setempat.

Perbekel Desa Pacung, I Made Yasa dikonfirmasi pertelepon kemarin siang tidak menampik rencana pemindahan kantor desa itu ditolak oleh Pakraman Pacung. Menurut Yasa, rencana pemindahan kantor desa itu sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang akan direalisasikan di tahun 2016 nanti. Rencana itu untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh warga. Karena selama ini lokasi kantor desa berada di ujung desa -berbatasan dengan Desa Julah. "Nah kami ingin lokasi kantor desa nantinya itu berada di tengah-tengah desa, supaya semua warga bisa menjangkau dengan cepat. Kalau sekarang, karena telat diujung timur, warga yang di barat itu terlalu jauh menjangkau kantor desa," terangnya.

Disinggung upaya mediasi, Perbekel Yasa mengakui upaya mediasi itu telah dilakukan. Dari upaya itu akhirnya disepakati, keputusan relokasi itu diserahkan pada panitia yang mewakili unsur tokoh masyarakat dari masing-masing banjar dinas. "Kami ingin persoalan ini menjadi klir, tidak dimasukkan urusan adat. Karena ini masalah kedinasan, supaya diselesaikan secara kedinasan. Nanti yang bersifat adat, biar diselesaikan di adat," ujarnya. **k19**

Edisi : Rabu, 24 Juni 2015

Hal : 4